KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: humas@kemenkopangan.go.id

SIARAN PERS
No. 07M/SES.M.PANGAN/SP/11/2026

30.725 Gerai KDKMP Rampung, Menko Pangan Percepat Pasokan Barang Subsidi dari BUMN

Jakarta, 23 November 2026 – Sebanyak 30.725 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah rampung, tetapi baru 2.589 gerai yang tercatat bertransaksi. Pemerintah kini mempercepat pemenuhan barang subsidi dan layanan dari BUMN agar gerai yang telah siap dapat segera beroperasi dan melayani masyarakat.

Percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Senin (23/11). Rapat mempertemukan Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait untuk memastikan pasokan beras SPHP, pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, Minyakita, ketersediaan layanan PLN, obat-obatan, dan perbankan di KDKMP.

“Bangunannya sudah ada. Sekarang barang dan layanannya harus segera tersedia. BUMN terkait perlu memastikan pasokan barang bersubsidi dan program pemerintah sampai ke gerai, sehingga koperasi bisa beroperasi dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” ujar Menko Pangan.

Menurutnya, percepatan pasokan juga penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap barang subsidi dengan harga sesuai ketentuan. Pemerintah mencermati laporan mengenai LPG 3 kilogram yang dibeli masyarakat seharga Rp23.000 hingga Rp24.000 per tabung, sementara harga dari Pertamina Patra Niaga disebut sebesar Rp13.700. Melalui KDKMP, harga jual kepada masyarakat diupayakan sekitar Rp16.500 per tabung, dengan batas harga tertinggi yang dapat berbeda menurut daerah dan disebut berkisar Rp18.000.

“Subsidi harus sampai kepada masyarakat yang berhak dengan harga yang semestinya. Karena itu, kita kawal jalur pasoknya sampai ke koperasi, bukan hanya memastikan gerainya berdiri,” kata Menko Pangan.

Dalam rakortas Menko Pangan juga memastikan persiapan KDKMP untuk dapat menjadi titik serah bantuan pemerintah.

“Selain terkait barang bersubsidi, KDKMP juga akan menjadi titik serah bantuan pemerintah misalnya Bansos, Bantuan Langsung Tunai (BLT), termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mana Manajer KDKMP dapat mengecek data desil yang berhak menerima bantuan pemerintah,” kata Menko Pangan.

Sebagai tindak lanjut rapat, pimpinan kementerian dan lembaga akan mendapat pembagian wilayah untuk meninjau KDKMP secara langsung. Pemeriksaan lapangan akan mencakup kesiapan gerai, ketersediaan barang dari BUMN, serta kendala distribusi yang menghambat operasional. Pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah juga akan dilibatkan dalam pengawalan.

“Nanti para menteri dibagi titik KDKMP yang akan dicek, bersama pemerintah daerah, gubernur, dan Pangdam. Kalau ada kendala pasokan di lapangan, kita identifikasi dan selesaikan bersama agar koperasi yang sudah terbangun bisa segera berjalan,” ujar Menko Pangan.

Turut Hadir dalam rapat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Wakil Menteri Desa PDT, Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, serta direktur utama dan jajaran direksi BUMN terkait, seperti Agrinas Pangan Nusantara, Perum Bulog, Pupuk Indonesia, Pos Indonesia, PLN, Patra Niaga, Kimia Farma, ID FOOD, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI,

---

Narahubung

Dr. Gunawan, S.T., M.Si.,
Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
0813-2186-7406